

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR

Tedy Saputra¹, Ginung Pratidina², Irma Purnamasari³

¹Universitas Djuanda Bogor, tedysptr6216@gmail.com

²Universitas Djuanda Bogor, ginung.pratidina@unida.ac.id

³Universitas Djuanda Bogor, irma.purnamasari@unida.ac.id

ABSTRAK

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu bantuan yang didapatkan dari dana desa untuk masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan melalui mekanisme pembagian uang sebesar Rp. 300.000 perbulan secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dan cara mengumpulkan data yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (survei, wawancara dan kuesioner). Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 76 orang responden dari masyarakat penerima bantuan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur telah dilaksanakan dalam kategori “baik” dengan nilai rata-rata 3,88 yang berarti petugas dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Campaka telah melakukan tugas dan kewajibannya semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Implementasi Program, BLT-DD, Kecamatan Campaka.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi isu perbincangan disetiap Negara salah satunya yaitu di Indonesia. Fenomena kemiskinan di Indonesia akan terus menjadi isu setiap tahunnya dikarenakan itu akan menjadi jejak digital kinerja pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada bulan September 2021 terdapat 26,5 juta orang penduduk miskin. Lahirnya era reformasi nampaknya belum bisa menumpas kemiskinan di Indonesia walaupun kasus kemiskinan selalu saja mengalami naik turun dan ini akan menjadi catatan panjang kasus kemiskinan di

Indonesia serta menjadi tugas pemerintah untuk segera menumpas kemiskinan di Indonesia.

Pada saat ini, pemerintah telah membuat beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya serta pada intinya program ini untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia, salah satunya yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Adapun syarat atau kriteria bagi masyarakat penerima BLT-DD ini yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan syaratnya sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan.

Hasil dari observasi awal penulis melihat fenomena dilapangan yang terjadi yaitu dimana dalam implementasi program BLT-DD ini mengalami beberapa permasalahan seperti tidak tepatnya sasaran penerima, masih terdapat masyarakat tergolong mampu tetapi masih mendapatkan bantuan sedangkan yang tidak mampu sama sekali tidak mendapatkan bantuan program ini, lalu permasalahan terjadi ketika pendataan yang dilakukan oleh petugas terdapat kasus dimana masyarakat penerima bantuan tidak memiliki KTP atau KK, padahal itu merupakan syarat administrasi bagi penerima bantuan, hal ini juga yang dapat menghambat dalam proses penyaluran bantuan, serta dari segi fasilitas yaitu sarana

prasarana dimana kurangnya tempat duduk saat pelaksanaan pembagian uang jadi beberapa masyarakat harus menunggu sambil berdiri.

Berdasarkan beberapa uraian masalah diatas, muncul rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

METODE PENELITIAN

Implementasi

Menurut Edward III (1990) implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terlihat setelah adanya arahan efektif dari suatu kebijakan dan mencakup upaya mengelola masukan untuk menghasilkan keluaran atau outcomes untuk masyarakat.

Implementasi meliputi berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana yang telah disusun guna mencapai tujuan dari rencana yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang dirumuskan mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan

Menurut Sombu dkk (2010), kebijakan adalah seperangkat konsep dan gagasan yang menjadi garis besar dan dasar bagi rencana dan cara bertindak bagi pemerintah, organisasi, dll. Untuk melaksanakan pekerjaannya, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau niat yang berfungsi sebagai pedoman bagi upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Robert Eyeston (Budi Winarno 2012), yaitu bahwa secara luas kebijakan publik adalah keterkaitan antara pihak pemerintah dan lingkungannya.

Model Implementasi Kebijakan

Untuk mempelajari model implementasi kebijakan publik, perlu dipahami variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kebijakan untuk menyederhanakan pemahaman konsep implementasi

kebijakan. Ada banyak model untuk menganalisis implementasi kebijakan, namun peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III untuk menganalisisnya, yaitu keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh 4 dimensi antara lain (a) Komunikasi (b) Sumber Daya (c) Disposisi (d) Struktur Birokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menerapkan rumus statistik untuk membantu menganalisis data yang didapat dari responden. Sugiyono (2019:7) berpendapat bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah karena memenuhi kaidah ilmiah yaitu bersifat konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya berbentuk numerik dan analisisnya menggunakan statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Populasi pada penelitian ini yaitu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Campaka khususnya di Desa Campaka dan Desa Cidadap tercatat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat 313 KPM dengan rincian di Desa Cidadap sebanyak 123 KPM dan Desa Campaka sebanyak 190 KPM.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu dengan digunakannya rumus Yamane. Sesudahnya dilakukan perhitungan rumus Yamane, dapat diperoleh jumlah sampel yaitu berjumlah 75,8 dan dibulatkan jadi 76 responden dari masyarakat dan untuk penarikan sampelnya menggunakan teknik simple random sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang analisis harus di dukung oleh data dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan berdasarkan sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (field reseacrh)

Adalah suatu penelitian yang dilaksanakan langsung dengan turun ke lapangan yang bertujuan dapat memperoleh suatu data yang berkaitan dengan

permasalahan untuk dijadikan obyek penelitian menggunakan teknik- teknik yaitu:

- a. Wawancara, dilakukan kepada beberapa responden baik dari pegawai maupun masyarakat penerima bantuan.
 - b. Obeservasi adalah mengumpulkan data secara langsung terhadap aktifitas obyek yang akan diteliti.
 - c. Dokumentasi ialah pengumpulan suatu data dengan menuliskan sebuah catatan yang berkaitan dengan BLT-DD dan data lain yang dibutuhkan pada kepentingan penelitian.
 - d. Kuesioner (Angket) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan memberikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan secara tertulis terhadap para responden untuk di jawab.
2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan suatu data sekunder dan dilakukan dengan cara membaca, belajar, mengutip dan meringkas isi buku terkait dengan pembahasan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mereduksi data ke dalam bentuk mudah dibaca, dipahami, dan diintervetasikan. Data yang harus dimasukkan analisis adalah studi tentang data penelitian lapangan dan perpustakaan, penelitian tersebut kemudian dianalisis mendapatkan kesimpulan. Dan analisis data, peneliti dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang dibahas dalam penelitian, dalam analisis data yang diperoleh, penulis gunakan metode analisis data menggunakan rumus Weight Mean Score (WMS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari hitungan yang didapat dari penyebaran kuesioner mengenai implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diukur dalam empat dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Tabel 1

Rekapitulasi Jawaban Masyarakat Pada Dimensi Komunikasi

No	Indikator	M	Kriteria
1.	Sosialisasi yang dilakukan oleh para pegawai mengenai BLT-DD kepada KPM	3,51	Baik
2.	Kejelasan isi informasi terkait persyaratan dan tata cara pencairan program BLT-DD	3,96	Baik
3.	Konsistensi informasi yang disampaikan pegawai terkait persyaratan dan tata cara pencairan kepada KPM	4,03	Baik
Jumlah		3,83	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan hasil tabel 1 yaitu rekapitulasi jawaban masyarakat pada dimensi komunikasi, didapatkan hasil bahwa skor nilai rata-rata dimensi komunikasi pada jawaban masyarakat yaitu memperoleh nilai 3,83 dengan kategori baik. Yaitu menunjukkan bahwa implementasi program BLT-DD pada dimensi komunikasi sudah baik. Namun, kenyataan dilapangan masih terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pegawai.

Hasil tersebut berdasarkan jawaban responden disertai wawancara dengan beberapa responden ada yang menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan petugas kepada masyarakat terkait persyaratan dan tata cara pencairan uang pada program BLT-DD ini sudah baik dan informasinya jelas hanya saja kedepannya

semoga sosialisasi perihal BLT-DD ini tidak hanya dilakukan bagi calon penerima saja, tetapi masyarakat lain yang tidak menerima pun harus mengetahuinya agar tidak terjadi permasalahan seperti kecemburuan sosial dan permasalahan lainnya dari masyarakat yang tidak menerima bantuan ini, karena memang sudah banyak terjadi permasalahan masyarakat yang cemburu atau protes dikarenakan tidak menerima bantuan padahal memang masyarakat tersebut tidak berhak menerima bantuan.

Tabel 2

Rekapitulasi Jawaban Masyarakat Pada Dimensi Sumber Daya

No	Indikator	M	Kriteria
1.	Kemampuan pegawai dalam memahami dan melaksanakan program BLT-DD	4,05	Baik
2.	Kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan implementasi program BLT-DD terhadap peraturan yang dibuat pemerintah	3,94	Baik
3.	Fasilitas (sarana dan prasarana) untuk menunjang implementasi program BLT-DD	3,92	Baik
Jumlah		3,97	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan hasil tabel 2 yaitu rekapitulasi jawaban masyarakat pada dimensi sumber daya, didapatkan hasil bahwa skor nilai rata-rata 3,97 dengan kategori baik. Yaitu menunjukkan bahwa implementasi program BLT-DD pada dimensi sumber daya sudah baik. Namun, kenyataan dilapangan masih terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pegawai.

Hasil tersebut berdasarkan observasi di lapangan disertai wawancara dengan responden bahwa kemampuan pegawai dalam melaksanakan program BLT-DD ini sudah lumayan cukup baik, dan para pegawai pun terlihat tahu dan paham akan program bantuan ini, apabila masyarakat ada yang bertanya para pegawai senantiasa menjawab dengan baik dan jelas. Hanya saja sarana dan prasarana yang berada di desa itu masih kurang, dikarenakan saat pembagian uang bantuan, terdapat beberapa dari masyarakat penerima bantuan ada yang tidak kebagian kursi, dan terpaksa harus menunggu sambil berdiri, masyarakat pun agak kesal.

Tabel 3

Rekapitulasi Jawaban Masyarakat Pada Dimensi Disposisi

No	Indikator	M	Kriteria
1.	Sikap pegawai dalam melayani, membantu, mempermudah saat pelaksanaan implementasi program BLT-DD	3,94	Baik
2.	Pengawasan atau pengendalian terhadap implementasi program BLT-DD	3,81	Baik
Jumlah		3,87	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan hasil tabel 3 yaitu rekapitulasi jawaban masyarakat pada dimensi disposisi, didapatkan hasil bahwa skor nilai rata-rata 3,87 dengan kategori baik. Yaitu menunjukkan bahwa implementasi program BLT-DD pada dimensi disposisi sudah baik. Namun, kenyataan dilapangan masih terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pegawai.

Hasil tersebut berdasarkan observasi disertai wawancara dengan beberapa responden dikatakan bahwa sikap para pegawai dalam melayani masyarakat sudah baik, apabila ada dari masyarakat yang tidak mengerti atau kurang paham para pegawai senantiasa membantu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa saat

melakukan pendataan, si petugas tidak murah senyum dan terlihat cemberut, hal itu membuat masyarakat tersebut tidak enak, mungkin para pegawai sedang capek atau bagaimana, tetapi tetap saja seorang petugas saat bertugas harus murah senyum kepada masyarakat yang dilayani agar masyarakat tersebut merasa senang.

Tabel 4

Rekapitulasi Jawaban Masyarakat Pada Dimensi Struktur Birokrasi

No	Indikator	M	Kriteria
1.	Pelaksanaan program BLT-DD yang dilakukan oleh petugas sesuai prosedur	3,93	Baik
2.	Kerjasama/koordinasi antara pegawai dalam implementasi program BLT-DD	3,81	Baik
Jumlah		3,87	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan hasil tabel 4 yaitu rekapitulasi jawaban masyarakat pada dimensi komunikasi, didapatkan hasil bahwa skor nilai rata-rata 3,87 dengan kategori baik. Yaitu menunjukkan bahwa implementasi program BLT-DD pada dimensi struktur birokrasi sudah baik.

Hasil tersebut berdasarkan observasi di lapangan disertai wawancara dengan beberapa responden dikatakan bahwa para pegawai sudah melakukan kegiatan program BLT-DD sesuai dengan prosedur yang ada, karena para petugas sudah melakukan sosialisasi, pendataan dan pembagian uang sesuai dengan yang sudah ditentukan dan tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dan menurut pandangan masyarakat kerjasama atau koordinasi antara pegawai sudah baik, buktinya tidak pernah terjadi permasalahan antara pegawai, tetapi memang di internal mereka nya masyarakat tidak tahu, dan koordinasi dengan masyarakat pun baik tidak terjadi miskomunikasi, setiap ada hal yang perlu ditanyakan kepada pegawai, masyarakat pun langsung bertanya dan para pegawai

senantiasa menjawabnya jadi memang koordinasi pegawai dengan masyarakat juga sudah cukup baik.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil pembahasan perihal implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, didapatkan sebuah kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh jumlah jawaban responden yaitu :
 - a. Skor nilai rata-rata yang didapat dari dimensi komunikasi yaitu 3,83 dengan kategori baik.
 - b. Skor nilai rata-rata yang diperoleh dari dimensi sumber daya yaitu 3,97 dengan kategori baik.
 - c. Skor nilai rata-rata yang diperoleh dari dimensi disposisi yaitu 3,87 dengan kategori baik.
 - d. Skor nilai rata-rata yang diperoleh dari dimensi struktur birokrasi yaitu 3,87 dengan kategori baik.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian serta pandangan peneliti ketika berada di lokasi penelitian maka peneliti memberikan suatu saran yang menjadi bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

Pada dimensi komunikasi perlu adanya peningkatan yang dilakukan oleh para petugas baik dari desa maupun kecamatan mengingat nilai yang diperoleh adalah nilai paling rendah yaitu 3,83 yang diperoleh dari sampel masyarakat. Untuk itu saran yang diberikan oleh penulis yaitu sosialisasi yang diadakan tidak hanya bagi masyarakat penerima bantuan saja, tetapi masyarakat lain yang tidak menerima bantuan pun harus mendapat informasi terkait program BLT-DD ini. Agar tidak terjadi permasalahan seperti kecemburuan sosial dan permasalahan lainnya, lalu

informasi yang diberikan harus lebih jelas serta rinci agar tidak ada pertanyaan lagi dari masyarakat mengenai program BLT-DD ini.

REFERENSI

Sumber Buku

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.

Kusumanegara, Salahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Prose Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media. Hal.97.

Nugroho D,R. (2009). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Purwanto Agus Erwan, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.S, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : GAVA MEDIA.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : alfabeta

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.

Tahir, Arifin.2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta

Winarno, Budi. ,(2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Sumber Jurnal

Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, Novie Anders Palar. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa." *JAP* No. 108 Vol VII (2021). *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen* 2.2 (2019): 63

Fitri Yul Dewi Marta, Ramadiyanti Nurlitasari. "Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 1, No. 1 (2021): 47-59

Imam Bashori, Tunggul Sihmbing, Muryanto Amin "Implementasi Kebijakan Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang". *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No. 1 (2023): 1-12

M. Daiumul Abror "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* Vol. 5 No. 2 (2021): 158-176

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1